



Cari Cara Tangani Kerusakan Jalan Komisi B DPRD Sekadau Jiplak Ilmu DBMP Bandung



Jajaran Komisi B DPRD Kabupaten Sekadau saat berada di Dinas Bina Marga Kota Bandung.

SEKADAU. Sejumlah anggota Komisi B DPRD Sekadau yang membidangi infrastruktur bertandang ke Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung, pekan lalu.

Wali Kota Kembang Wajibkan Semua Dinas Punya *Twitter*

Kedatangan mereka untuk mempelajari cara penanganan kerusakan jalan di kota kembang tersebut, baik yang berstatus nasional, provinsi, maupun jalan kota.

“Dalam kunjungan itu, kita disambut Sekretaris DBMP Didi Ruswandi, dan Kepala Bidang Perencanaan Agus Hidayat,” ujar Isnaini, Ketua Komisi B DPRD Sekadau, kepada Rakyat Kalbar di kantornya, Senin (16/2).

■ Halaman 7

Komisi Bdari halaman 1

Ditegaskan Isnaini, dalam kunjungan kerja itu, Komisi B mendapati Wali Kota Bandung getol menggunakan media sosial sebagai sarana kritik atas pembangunan yang ia lakukan. “Yang kita dapati bahwa Walikota Bandung, Ridwan Kamil, mewajibkan semua SKPD mempunyai *Twitter*,” ujarnya.

Lantas, apa hubungan *Twitter* dengan kerusakan jalan? Dijelaskan Isnaini, *Twitter* digunakan sebagai media untuk masyarakat memberikan laporan langsung kepada SKPD. Sehingga, laporan dari masyarakat Bandung dapat diakses dengan cepat oleh setiap SKPD, termasuk soal kerusakan jalan.

“Kemudian di DBMP Bandung ada

URC (Unit Reaksi Cepat) yang diberikan tugas menangani kerusakan jalan dengan segera, yang dilaporkan ke masyarakat melalui *Twitter* tersebut. Sehingga penanganan dengan cepat diatasi,” ucapnya.

Dalam hal penanganan jalan negara dan provinsi di Kota Bandung, lanjut politisi Golkar itu, ketika ada laporan dari masyarakat, juga ditangani oleh DBMP. Mereka menggunakan anggaran dengan kode rekening belanja barang.

“Sejak awal mereka sudah membelikan barang berupa material, baik aspal, batu dan lain-lain yang mereka stok-kan di gudang. Material itu setiap saat dapat digunakan untuk penanganan jalan secara darurat. Karena belanja barang, ia tidak

masuk dalam aset daerah,” jelasnya.

Solusi itu, menurut Isnaini, terbukti ampuh dan tidak menyalahi aturan penggunaan keuangan. Filosofisnya adalah kepentingan masyarakat secara mendesak dan untuk keselamatan di jalan raya.

“Penggunaan anggaran dengan cara seperti ini tidak dipermasalahkan BPK,” katanya.

Ia berharap, apa yang dilakukan DBMP Kota Bandung itu bisa diterapkan oleh Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Sekadau. “Kita harapkan di Sekadau juga seperti itu. Kita dari Dewan juga siap memback-up anggarannya,” tekad Isnaini. (bdu)